

SKRIPSI

DEDY PURWOKO

SUATU STUDI KHUSUS MENGENAI SISTEM PEMASYARAKATAN ANAK DI INDONESIA



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

SUATU STUDI KHUSUS MENGENAI SISTEM PEMASYARAKATAN ANAK DI INDONESIA

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
PERSYARATAN UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM

Pembimbing

Penulis,



MADE DARMA WEDA, S.H., M.S

NIP : 131 801 632



DEDY PURWOKO

NIM : 039614368

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

Skripsi ini telah diuji dan disetujui oleh Panitia Penguji
pada tanggal : 27 Oktober 1999

Tim Penguji Skripsi :

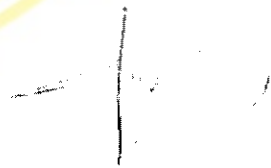
1. Ketua : Moch. Zaidun, S.H., M.Si.



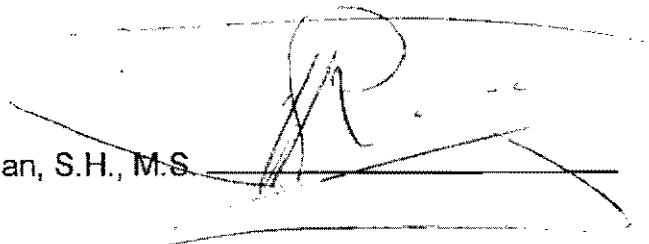
2. Anggota : 1. Made Darma Weda, S.H., M.S.



2. Drs. Duta Nurdibyandaru, M.S.



3. Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.



BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dengan telah penulis uraikan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan anak di Indonesia, berikut ini penulis simpulkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pidana merupakan suatu nestapa yang dikenakan kepada seseorang sebagai akibat dengan telah dilakukannya perbuatan pidana oleh orang yang bersangkutan. Penge-
naan pidana ini terhadap seseorang yang telah melaku-
kan perbuatan pidana tersebut merupakan hak negara da-
lam rangka melindungi segenap rakyat Indonesia serta
untuk menciptakan kedamaian dalam perikehidupan ber-
bangsa dan bernegara. Pemidanaan memiliki maksud' atau
tujuan sebagai berikut :
 - a. Menata dan memperkuat kembali nilai-nilai sosial
yang hidup dalam masyarakat;
 - b. Mencegah terjadinya kejahatan dan pengulangan keja-
hatan demi pengayoman dan perlindungan masyarakat;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dari terja-
dinya kejahatan dan memulihkan keseimbangan dalam
perikehidupan;
 - d. Memulihkan kepercayaan masyarakat (terutama korban)
sebagai akibat terjadinya kejahatan;

e. Membebaskan rasa bersalah pada diri pelaku kejahatan.

Perkembangan pelaksanaan pidana penjara telah mengalami pembaharuan yang cukup pesat baik secara Internasional, regional maupun nasional. Gerakan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dipelopori oleh Cesare Beccaria (1738 - 1794). Gerakan pembaharuan ini membawa konsekuensi berupa perubahan pandangan terhadap pidana penjara yang awalnya bersifat punitif berubah menjadi rehabilitatif dengan menonjolkan aspek manusiawi dalam perlakuan terhadap narapidana.

Di Indonesia gerakan pembaharuan ini diawali oleh pidato pengukuhan Sahardjo dalam memperoleh gelar Doctor Honoris Causa pada tahun 1963, yang kemudian kita kenal pemikiran ini dengan nama sistem pemasyarakatan. Pembaharuan ini tidak menyebabkan berubahnya pidana penjara menjadi pidana pemasyarakatan. Yang mengalami perubahan adalah kebijakan dalam pelaksanaan pidananya. Sifat sebagai suatu nestapa tetap tidak dapat dihilangkan. Sebagai puncak pembaharuan pidana penjara di Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-undang No. 12 tahun 1995. Dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tersebut telah terkandung jiwa pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan menganggap narapidana sebagai subyek dan bukan sebagai obyek. Jiwa pembaharuan telah mengalami perubahan menjadi upaya rehabilitatif kepada narapidana.

2. Dengan adanya gerakan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara ini, dalam pelaksanaan di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup pesat. Sistem pemasyarakatan sebagai kebijakan dalam pelaksanaan pidana penjara telah berjalan kurang lebih 35 tahun telah menunjukkan keberhasilan serta sekaligus kegagalannya. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam memenuhi tujuan pemidanaan. Faktor-faktor yang mendukung atau yang mendorong keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Sistem, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan, termasuk pula sistem atau pola pembinaan terhadap narapidana. Keberadaan Undang-undang No. 12 tahun 1995 telah memberikan dukungan yang cukup besar bagi pelaksanaan pidana penjara yang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan, yaitu memberikan landasan yuridis yang kuat terhadap pelaksanaan pidana penjara.
- b. Anak didik pemasyarakatan, peranan yang diberikan oleh anak didik pemasyarakatan sangat penting dan strategis. Kesediaan untuk dibina dan kemauan untuk mengubah diri menuju arah yang lebih baik akan sangat menunjang pelaksanaan sistem pemasyarakatan anak di Indonesia.
- c. Aparat pelaksana, peranan dan fungsi aparat pelaksana dari sistem pemasyarakatan anak dalam menen-

tukan keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan anak tidak dapat dipandang sebelah mata. Mereka memiliki peranan yang strategis dan penting, karena di tangan merekalah anak didik pemasyarakatan dibina dan dibimbing untuk kembali sebagai manusia yang "normal", yang bebas dan bertanggung jawab.

- d. Masyarakat, keberadaan masyarakat sangat penting untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan anak. Di terima atau tidaknya anak dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kesediaan masyarakat tersebut untuk menerima kembali anak sebagai anggotanya. Dan ini sangat berperan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan anak di Indonesia.

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan sistem pemasyarakatan anak adalah sebagai berikut :

- a. Adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan jiwa pembaharuan pidana penjara.
- b. Pandangan-pandangan konvensional masyarakat terhadap bekas narapidana, seperti adanya pomeo yang berlaku dalam masyarakat : sekali lancung keujian seumur hidup tak dipercaya.
- c. Adanya stigma (stigma sosial dan stigma formal) yang berasal dari masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana hal ini me-

upakan hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan anak di Indonesia. Adanya stigma yang demikian dapat menyebabkan anak berusaha untuk melakukan atau berbuat seperti stigma yang diterimanya tersebut.

- d. Belum diterimanya secara utuh ide pemasyarakatan di kalangan aparat pelaksana sistem pemasyarakatan.
 - e. Kurangnya dukungan dari keluarga dalam melakukan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan.
 - f. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan sistem pemasyarakatan anak.
 - g. Adanya kelemahan-kelemahan dalam UU No. 12 tahun 1995, dan belum ada peraturan pelaksana dari UU tersebut.
3. Terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak banyak menimbulkan pertanyaan. Salah satu pertanyaan tersebut adalah apa yang menjadi kausa kejahatannya ? Mengkaji permasalahan ini bukanlah pekerjaan yang mudah, hal ini terjadi karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh anak. Namun pada umumnya kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan hasil dari ketidakmampuan dari konstitusi mental dalam mengendalikan keinginan manusia (anak) pada perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Ketidakmampuan ini sebagai akibat dari pengaruh struktur sosial dari anak tersebut.

Permasalahan makin maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak sudah sampai taraf yang cukup memprihatinkan dan dibutuhkan penanganan yang segera. Sebagai salah satu bentuk kebijakan kriminal terhadap permasalahan tersebut adalah melalui jalan pemidanaan. Pidana sebagai suatu remedium hendaknya dijatuhkan sebijiaksana mungkin, yang artinya mempertimbangkan kondisi, sifat, karakter anak yang khas. Dalam pelaksanaan pidana penjara yang dilaksanakan dengan sistem masyarakatan, hal yang terpenting adalah mengenai sistem atau pola pembinaan yang akan diterapkan untuk anak didik masyarakatan. Pola atau sistem pembinaan bagi anak didik masyarakatan agar lebih efektif hendaknya mempertimbangkan atau memperhatikan dan berpijak pada nilai-nilai sosial, aspek-aspek budaya dan faktor struktural masyarakat Indonesia. Sistem pembinaan yang sesuai tersebut adalah pembinaan yang berorientasi pada pembinaan bagi anak (personal) dan pembinaan yang berorientasi pada struktur sosial. Keterpaduan pembinaan yang demikian (pembinaan interaksional positif) merupakan suatu *conditio sine qua non* dalam upaya lebih meningkatkan efektivitas pidana penjara dalam memenuhi tujuan pemidanaan. Hal ini terjadi karesasaran dari pembinaan ini adalah menghilangkan faktor kriminogen dan faktor viktimogen baik dalam diri anak maupun yang berada pada struktur sosialnya. Pembinaan interaksional positif ini berpijak pada nilai-nilai